

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	<div>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA</div>	<div>1721 - A2</div>
	<div>NOMOR : P3/<div><div></div> Pembetulan Ke<div><div></div> Pembatalan</div></div></div>	<div>MASA PEROLEHAN PENGHASILAN<div><div>0</div><div>1</div><div>1</div><div>2</div></div><div>TAHUN PEROLEHAN PENGHASILAN<div><div>2</div><div>0</div><div>2</div><div>5</div></div></div></div>

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP : 705849206115000	A.5 NAMA JABATAN : Penghulu Pertama
A.2 NIP/ NRP : 198009082023211004	
A.3 NAMA : MUHAMMAD KAMIL, S.HI	A.6 JENIS KELAMIN : <div>V</div> LAKI - LAKI <div></div> PEREMPUAN
	A.7 NIK : 1219050809800002
A.4 PANGKAT/ GOLONGAN : IX / IX	A.8 STATUS/ JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP <div>K / 01</div>

URAIAN			JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <div>x</div> 21-100-01 <div></div> 21-100-02			
PENGHASILAN BRUTO			
1.	GAJI POKOK / PENSIUN		38.947.200
2.	TUNJANGAN ISTRI		3.894.720
3.	TUNJANGAN ANAK		778.944
4.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN		0
5.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL		3.120.000
6.	TUNJANGAN BERAS		2.607.120
7.	TUNJANGAN KHUSUS		601
8.	TUNJANGAN LAIN - LAIN		0
9.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 )		49.348.585
PENGURANG			
10.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN		2.467.429
11.	IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT		0
12.	ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA		0
13.	JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12)		2.467.429
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO ( 9 -13 )		46.881.156
15.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
16.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN )		46.881.156
17.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		63.000.000
18.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17)		0
19.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN		0
20.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
21.	PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK		0
22.	PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT DI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19-20-21)		0
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DI POTONG DAN DI LUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR		0
	23a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
	23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0
24.	PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR		0
	24a. PPh PASAL 21 DI POTONG		0
	24b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)		0

C. PEGAWAI TERSEBUT C.01  DIPINDAHKAN C.02  PINDAHAN C.03  BARU C.04  PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	<div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>8</div> <div>0</div> <div>8</div> <div>8</div> <div>0</div> <div>7</div> <div>1</div> <div>1</div> <div>5</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div>
D.2 Nama Instansi Pemerintah	:	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATU BARA
D.3 ID Sub Unit Organisasi	:	
D.4 Tanggal	:	<div>1</div> <div>5</div> <div>0</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>2</div> <div>6</div>
D.5 NAMA PENANDATANGAN	:	YUNAINI, S.Kom
D.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah